

## **Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

**Intan Marselina Da Lopez <sup>1)</sup>, Marjenya Putry Ndak <sup>2)</sup>, Mariana Chelsea Pamut <sup>3)</sup>, Maria Regina Cherlin Bui Kein <sup>4)</sup>, Bergita Mediatriks Rinanda <sup>5)</sup>, Theresia Avila Surat Angin <sup>6)</sup>, Maria O. Lewo Melan <sup>7)</sup>, Noberta Sabu Making <sup>8)</sup>, Vinsensia Chinthya Berek <sup>9)</sup>, Ayuvera Rifani Ray <sup>10)</sup>**

Universitas Nusa Cendana  
Email: dalopezintan26@gmail.com

### **Abstrak**

Perpajakan memiliki peran vital dalam perekonomian dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya di Indonesia. Pajak, sebagai sumber pendanaan utama bagi pembangunan infrastruktur dan layanan publik, mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artikel ini mengkaji peran Pajak Penghasilan (PPh) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dari PPh berkontribusi signifikan dalam membiayai proyek infrastruktur yang meningkatkan mobilitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, dibahas berbagai teori pertumbuhan ekonomi yang memperkuat hubungan antara pajak, belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pajak dan pembangunan infrastruktur dapat menciptakan siklus positif yang memperkuat perekonomian nasional. Dengan demikian, pentingnya perencanaan dan pengelolaan perpajakan yang efektif serta alokasi yang tepat untuk sektor produktif menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Peran Pajak, Pertumbuhan Ekonomi*

### **Abstract**

*Taxation plays a vital role in the economy and economic growth of a country, especially in Indonesia. Taxes, as the main source of funding for infrastructure development and public services, support the government's efforts to create an environment conducive to sustainable economic growth. This article examines the role of Income Tax (PPh) in boosting economic*

**Intan Marselina Da Lopez, Marjenya Putry Ndak, Mariana Chelsea Pamut , Maria Regina Cherlin Bui Kein, Bergita Mediatriks Rinanda, Theresia Avila Surat Angin, Maria O. Lewo Melan, Noberta Sabu Making, Vinsensia Chinthya Barek, Ayuvera Rifani Ray**

Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

*growth, with a focus on its contribution to infrastructure development. The results of the study show that increased revenue from income tax contributes significantly to financing infrastructure projects that improve economic mobility and the quality of human resources. In addition, various economic growth theories that reinforce the relationship between taxes, government spending, and economic growth are discussed. Research shows that the synergy between taxes and infrastructure development can create a positive cycle that strengthens the national economy. Thus, effective tax planning and management, as well as appropriate allocation to productive sectors, are key to achieving inclusive and sustainable economic growth.*

**Keywords:** *The Role of Taxation, Economic Growth*

## **Pendahuluan**

Perpajakan memainkan peran yang sangat vital dalam perekonomian dan pertumbuhan suatu negara, terutama di Indonesia. Pajak, sebagai iuran yang dibayar oleh individu maupun kelompok usaha kepada negara, menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Dengan penggunaan pajak yang efisien, pemerintah dapat menciptakan infrastruktur, menyediakan layanan publik, dan mengurangi ketimpangan sosial. Sebagai masyarakat yang taat pajak, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan dalam perpajakan sangat penting untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan.

Pajak memegang peranan penting dalam menopang keberlanjutan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Sebagai sumber pendanaan negara, pajak tidak hanya berfungsi untuk membiayai infrastruktur tetapi juga menjadi instrument dalam menjaga stabilitas ekonomi, redistribusi kekayaan, dan mendorong inovasi. Dalam hal lain, daya guna Pajak Penghasilan dalam mendorong pertumbuhan sangat bergantung pada kepatuhan pajak yang tinggi dan administrasi perpajakan yang transparan, adil, dan efisien. Reformasi perpajakan yang berkelanjutan, termasuk modernisasi sistem dan perluasan basis pajak, sangat krusial untuk memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara merata dan menciptakan iklim investasi yang pasti secara hukum. Ketika sistem PPh dianggap kredibel dan adil, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan

pelaku usaha, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi sukarela dalam pembiayaan negara. Pendanaan yang stabil ini memungkinkan pemerintah untuk mempertahankan stabilitas makro ekonomi dan menjaga kesinambungan program-program pembangunan jangka panjang yang menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.

Pajak Penghasilan (PPh) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), penerimaan PPh berkontribusi pada pembiayaan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang meningkatkan mobilitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Ketika masyarakat dan pelaku usaha membayar PPh, dana tersebut kembali ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer ke Daerah, yang membantu pemerintah provinsi melakukan berbagai program peningkatan ekonomi, seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan pariwisata, dan pelatihan tenaga kerja. Dengan adanya perputaran dana dari PPh, iklim investasi di NTT semakin meningkat karena infrastruktur membaik dan daya beli masyarakat naik. Hal ini menunjukkan bahwa PPh bukan hanya kewajiban fiskal, tetapi instrumen strategis untuk memperkuat basis ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **Kajian Teori**

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemahaman mengenai bagaimana perekonomian dapat tumbuh dari waktu ke waktu menjadi penting, tidak hanya bagi para ekonomi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Seiring berkembangnya dinamika ekonomi global, berbagai teori pertumbuhan ekonomi telah dikembangkan oleh para ahli untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan output, produktivitas, serta perubahan struktural dalam suatu negara. Teori-teori ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami proses pembangunan ekonomi jangka panjang, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam Pertumbuhan Ekonomi ada beberapa Teori Pertumbuhan Ekonomi yang dapat diterapkan salah satunya adalah Teori Klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Ahli yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh David Ricardo merumuskan teori ini dalam buku berjudul *The Principles of Political and Taxation*. Bertolak belakang dengan pendapat Adam Smith sebelumnya, menurutnya pertumbuhan penduduk yang besar dapat berdampak pada kelebihan tenaga kerja sehingga upah yang diberikan akan menurun. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan antara pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum.

Dalam pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik lebih menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik ini dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan

kepada pemisahan ini selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh pertambahan penduduk kepada tingkat produksi nasional dan pendapatan.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaanya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi dan pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal itu akan menimbulkan investasi baru dan pertumbuhan ekonomi akan terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Dengan demikian kemakmuran masyarakat menurun kembali dan ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Apabila keadaan seperti ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (*Stationary state*). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (*subsistence*). Menurut pandangan teori klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut secara per kapita. Akibatnya pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita. Apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya (Sukirno, 2006:433) (Alvena Adhina Putri, Achmad Aryazeta, Zainal Fu'ad, 2024).

Menurut Schumpeter pertumbuhan ekonomi lebih menitikberatkan pengaruhnya pada pentingnya peranan pengusaha. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan output, memperluas pasar, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan – perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru. Teori klasik adalah salah satu teori pertumbuhan ekonomi tertua yang telah ada sejak abad ke-18 adalah teori klasik. Adam Smith, tokoh terkemuka yang kerap dikaitkan dengan teori ini memiliki anggapan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan dapat meraih titik tertinggi melalui sistem liberal. Sistem tersebut terdiri dari dua unsur utama, yakni pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Meski demikian, konsep awal teori ini mendapatkan tentangan dari tokoh lainnya, David Ricardo. Ia beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk sebenarnya tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hal itu hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah banyak sehingga dapat berdampak pada penurunan upah pekerja.

Dalam peran pajak penghasilan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini memiliki hubungan pajak dan pertumbuhan ekonomi yaitu Pendapatan dan Pengeluaran Publik. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama pemerintah di Indonesia. Dengan mengenakan pajak pada pendapatan individu, perusahaan, dan transaksi ekonomi lainnya, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan proyek publik. Pendapatan yang diperoleh dari perpajakan digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan juga ada Tarif Pajak yang dikenakan pemerintah sangat berdampak bagi pertumbuhan

Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia  
(Intan Marselina Da Lopez, Marjenya Putry Ndak, Mariana Chelsea Pamut, Maria Regina Cherlin Bui Kein, Bergita Mediatriks Rinanda, Theresia Avila Surat Angin, Maria O. Lewo Melan, Noberta Sabu Making, Vinsensia Chinthya Berek, Ayuvera Rifani Ray, 2026)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 4, No. 1, Maret 2026, (Hal. 1-26)

ekonomi. Pajak penghasilan pribadi dan perusahaan yang tinggi dapat mengurangi insentif untuk berinvestasi, menabung, dan membelanjakan uang. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena individu dan dunia usaha mungkin ingin mengurangi aktivitas ekonomi jika pajak terlalu tinggi. Ada juga Efisiensi Pajak yang mempunyai dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Sistem perpajakan yang rumit dan tidak efisien dapat menghambat pertumbuhan karena menimbulkan biaya administrasi yang tinggi dan mempersulit pelaksanaan bisnis. Menyederhanakan sistem perpajakan dan mengurangi hambatan birokrasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya kepatuhan dan mendorong dunia usaha untuk tumbuh dan berinovasi. Dalam beberapa kasus, reformasi perpajakan yang menyederhanakan sistem dan mengurangi birokrasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

### **Kaitannya dengan Pajak**

Dalam mewujudkan tujuan negara, pada setiap pemerintahan negara memerlukan berbagai macam unsur pendukung, meliputi Struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Peraturan perundang-undangan, Program-pogram kerja, maupun Sumber-sumber penerimaan negara. Contoh, sumber-sumber penerimaan negara di Indonesia pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Dalam Pajak ada teori-teori yang dapat diterapkan salah satunya adalah Teori Bhakti. Teori Bhakti ini berdasarkan paham “organische Staatsleer” sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat negara inilah maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Semenjak berabad-abad hak ini telah diakui dan orang selalu menginsafinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda bhaktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Sedang diabad yang

Page 7 of 26

“melahirkan” Negara modern sama dengan Negara hukum. Maka Negara modern (hukum) dalam membuat kebijakan pemungutan pajak tentu ada keharusan didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Seperti halnya di Indonesia yang merupakan Negara modern sekaligus sebagai Negara hukum, kebijakan pemungutan pajak didasarkan pada Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 “Segala pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara berdasar peraturan perundang-undangan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa siapapun (termasuk Negara) tidak berhak dan berwenang memungut pajak kecuali sudah dibuatkan dan diberlakukan peraturan perundang-undangnya.

Dalam Pertumbuhan Ekonomi, tentu saja pajak memberikan dampak positif yakni Kebijakan penurunan tarif pajak badan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Penurunan tarif pajak secara langsung mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, sehingga mendorong peningkatan laba dan memperbaiki posisi keuangan mereka. Selain itu, perusahaan yang sebelumnya menghadapi tarif pajak efektif tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk menggunakan instrumen pembiayaan berupa utang sebagai strategi optimalisasi pajak. Kondisi ini pada akhirnya dapat berkontribusi pada perbaikan struktur modal dan kinerja keuangan. Kebijakan penurunan tarif pajak juga berimplikasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan UMKM yang memiliki keterbatasan pendapatan. Dengan tarif yang lebih rendah, hambatan kepatuhan dapat diminimalkan sehingga mendorong peningkatan kontribusi pajak terhadap negara.

Selain kebijakan tarif, pengelolaan perpajakan melalui sistem elektronik turut memberikan dampak positif bagi administrasi perpajakan nasional. Penggunaan sistem elektronik mempermudah proses transaksi, pelaporan, dan pengumpulan pajak, sehingga meningkatkan efisiensi administrasi serta mengurangi biaya operasional perpajakan. Digitalisasi ini juga mendukung peningkatan penerimaan negara melalui proses pemungutan pajak yang lebih cepat, akurat, dan transparan.

Bagi sektor UMKM, pemanfaatan e-commerce dan sistem elektronik membuka peluang peningkatan penjualan sekaligus mempermudah pelaksanaan kewajiban pajak, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja usaha.

Kebijakan perpanjangan masa pengajuan wajib pajak juga memberikan manfaat bagi perusahaan. Adanya waktu tambahan dalam proses pelaporan pajak memungkinkan perusahaan melakukan persiapan administrasi yang lebih matang, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan pelaporan dan menekan biaya kepatuhan. Bagi UMKM, kebijakan ini meningkatkan tingkat kepatuhan karena memberikan ruang yang lebih longgar untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Secara makro, perpanjangan masa pelaporan turut mendorong peningkatan penerimaan negara, karena wajib pajak memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan dan menyetorkan kewajibannya.

Selanjutnya, pengenalan sistem pengungkapan sukarela (voluntary disclosure program) menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan akurasi informasi perpajakan. Program ini mendorong perusahaan untuk memberikan data yang lebih akurat kepada pemerintah maupun para pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap kinerja perusahaan. Di sisi fiskal, sistem pengungkapan sukarela membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyediaan mekanisme penyelesaian kewajiban yang lebih jelas dan bersifat korektif. Dengan demikian, program ini berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak negara melalui pelaporan yang lebih akurat dan transparan.

Di balik berbagai manfaatnya, penurunan tarif pajak badan juga membawa sejumlah dampak negatif yang perlu diperhatikan. Meski tarif pajak diturunkan, kebijakan ini tidak serta-merta mengurangi praktik penghindaran pajak oleh

perusahaan. Banyak perusahaan tetap melakukan strategi penghindaran pajak untuk meminimalkan laba kena pajak, sehingga efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan menjadi terbatas. Penurunan tarif pajak juga tidak memberikan dampak signifikan pada sektor-sektor tertentu yang kontribusinya terhadap penerimaan negara relatif kecil, sehingga kebijakan ini cenderung kurang optimal dalam meningkatkan pendapatan fiskal. Selain itu, bagi beberapa perusahaan, khususnya yang telah go public, penurunan tarif pajak justru berpotensi mengurangi optimalisasi perolehan laba, yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja keuangan mereka.

Dampak negatif juga muncul dalam pengelolaan perpajakan melalui sistem elektronik. Meskipun digitalisasi memberikan efisiensi, terdapat potensi penyalahgunaan sistem elektronik untuk praktik penghindaran pajak, yang dapat mengurangi penerimaan negara. Ketergantungan terhadap teknologi yang stabil dan infrastruktur yang memadai juga menjadi tantangan tersendiri. Gangguan teknis, keterbatasan jaringan, atau sistem yang tidak terintegrasi dengan baik dapat menghambat proses pelaporan maupun pemungutan pajak, sehingga mengurangi efektivitas administrasi perpajakan. Di wilayah atau sektor dengan infrastruktur digital yang belum optimal, penerapan sistem ini justru dapat menimbulkan hambatan baru dalam pengelolaan perpajakan.

Kebijakan perpanjangan masa pengajuan wajib pajak turut memberikan risiko tersendiri, khususnya terkait potensi meningkatnya praktik penghindaran pajak. Waktu pelaporan yang lebih longgar dapat dimanfaatkan sebagian wajib pajak untuk menunda kewajiban mereka, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas penerimaan pajak. Di sisi lain, penundaan pelaporan juga dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak, yang berdampak pada arus kas perusahaan maupun stabilitas penerimaan negara. Kebijakan ini kembali tidak memberikan pengaruh signifikan pada sektor-sektor dengan kontribusi pajak kecil, sehingga hasil yang diharapkan terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan tidak tercapai secara optimal.

Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia  
(Intan Marselina Da Lopez, Marjenya Putry Ndak, Mariana Chelsea Pamut, Maria Regina Cherlin Bui Kein, Bergita Mediatriks Rinanda, Theresia Avila Surat Angin, Maria O. Lewo Melan, Noberta Sabu Making, Vinsensia Chinthya Berek, Ayuvera Rifani Ray, 2026)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 4, No. 1, Maret 2026, (Hal. 1-26)

Sementara itu, pengenalan sistem pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) juga menghadirkan risiko tertentu. Meskipun bertujuan meningkatkan transparansi, program ini dapat dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk menunda pelaporan atau memanipulasi informasi demi menghindari kewajibannya. Selain itu, proses pengungkapan sukarela yang memerlukan verifikasi informasi secara mendalam dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi perpajakan. Seperti kebijakan lainnya, dampak dari program ini relatif kecil pada sektor-sektor dengan kontribusi pajak yang rendah, sehingga efektivitasnya dalam meningkatkan penerimaan negara tidak optimal.

Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pajak juga memberikan faktor-faktor yang efektivitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Struktur dan desain tarif pajak merupakan elemen fundamental dalam menentukan efektivitas kebijakan fiskal suatu negara. Penetapan tarif pajak harus berada pada tingkat yang optimal agar tidak menimbulkan distorsi terhadap aktivitas ekonomi. Tarif yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi insentif kerja,

Efektivitas sistem perpajakan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah mengalokasikan penerimaan pajaknya. Alokasi yang diarahkan pada kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta investasi penelitian dan pengembangan akan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Investasi publik semacam ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tetapi juga memperkuat daya saing negara.

Terakhir, efektivitas pajak penghasilan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan sinergi kebijakan lainnya. Pajak akan bekerja secara optimal

**Intan Marselina Da Lopez, Marjenya Putry Ndak, Mariana Chelsea Pamut , Maria Regina Cherlin Bui Kein, Bergita Mediatriks Rinanda, Theresia Avila Surat Angin, Maria O. Lewo Melan, Noberta Sabu Making, Vinsensia Chinthya Barek, Ayuvera Rifani Ray**

Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

dalam lingkungan ekonomi yang stabil, dengan inflasi rendah, tingkat suku bunga terkendali, serta kebijakan moneter yang kredibel.

### **Metode Penelitian**

Dalam jurnal ini menggunakan metode studi literatur yang di mana studi ini menggunakan sumber-sumber tertulis seperti jurnal atau makalah yang di mana sebelumnya untuk mengumpulkan data dan membangun landasan teori. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu topik yang memastikan penelitian yang dilakukan relevan, serta mencari temuan-temuan dari penelitian untuk dijadikan acuan. Dalam studi ini menggunakan pengumpulan data sekunder dan Studi Literatur. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan dan meninjau literatur yang relevan dari berbagai sumber akademik dan non-akademik. Sumber-sumber ini mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan makalah konferensi yang membahas tentang Peran Pajak Penghasilan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Peran Pajak Penghasilan dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

Pajak Penghasilan (PPh) berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik, serta sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong stabilitas fiskal. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada UUD Pancasila dan UUD 1945. Perkembangannya telah membawa kemajuan besar dalam kehidupan nasional, namun hal ini harus didukung oleh seluruh potensi yang dimiliki pemerintah dan masyarakat. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kesejahteraan, keselamatan, pertahanan, dan informasi warga negaranya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan tujuan bernegara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:

Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keabadian, dan keadilan sosial. Sejak reformasi perpajakan tahun 1984, pajak penghasilan dengan cepat menjadi sumber pendapatan penting di Indonesia.

Dalam APBN tahun 2009, pajak penghasilan orang pribadi merupakan penyumbang terbesar (lebih dari 50%) terhadap penerimaan pajak harian negara, yaitu sebesar Rp 366,8 triliun dari total penerimaan pajak sebesar Rp 657,3 triliun. Pajak umumnya menciptakan distorsi dalam perekonomian. Untuk meminimalkan distorsi ini, negara biasanya mengalihkan sumber daya dari jenis pajak lain ke pajak penghasilan, yang dianggap memiliki beban pajak paling rendah (Suratman, 2009) dalam (Adilla et al., 2025). Perpajakan memainkan peran fundamental dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, sistem perpajakan diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menjadi tonggak reformasi perpajakan terbaru untuk memperkuat administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi masyarakat, pajak seringkali dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan pembayaran pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Bagi ekonomi, pajak bukan semata sebagai alat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana, tetapi juga untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, baik perilaku ekonomis maupun psikologis. Beban bagi masyarakat di satu sisi dan

potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi pemerintah seringkali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak (Sumarsono, 2010). Dalam konteks aktual, pajak semakin menunjukkan kontribusi vitalnya. Pada APBN 2024, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 2.309,1 triliun atau sekitar 70% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas fiskal Indonesia sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Dengan demikian, dibutuhkan kajian komprehensif yang menganalisis peran pajak dalam menopang perekonomian nasional serta dinamika yang memengaruhi efektivitas pemungutannya.

Saragih, 2018 dalam penelitiannya menganalisis hubungan antara penerimaan pajak penghasilan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan data time series Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan PPh mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional. Namun demikian, Saragih juga menekankan bahwa efek positif pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kebijakan tarif dan efektivitas pemanfaatan penerimaan pajak. Tarif pajak penghasilan yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan tingkat investasi dan konsumsi masyarakat, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pajak penghasilan perlu dirancang secara proporsional agar tidak menimbulkan distorsi terhadap aktivitas ekonomi. Temuan Saragih tersebut memperkuat argumen bahwa pajak penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang harus diimbangi dengan pengelolaan belanja pemerintah yang produktif. Dengan demikian, pajak penghasilan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi apabila diarahkan untuk mendukung sektor-sektor

Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia  
(Intan Marselina Da Lopez, Marjenya Putry Ndak, Mariana Chelsea Pamut, Maria Regina Cherlin Bui Kein, Bergita Mediatriks Rinanda, Theresia Avila Surat Angin, Maria O. Lewo Melan, Noberta Sabu Making, Vinsensia Chinthya Barek, Ayuvera Rifani Ray, 2026)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 4, No. 1, Maret 2026, (Hal. 1-26)

produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Widodo dan Guritno (2017) dalam (Saragih, 2018) penelitiannya menganalisis hubungan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi menggunakan data makroekonomi Indonesia dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan PPh mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional. Lebih lanjut, Widodo dan Guritno menegaskan bahwa efektivitas pajak penghasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kualitas belanja pemerintah. Pajak penghasilan yang dialokasikan untuk belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terbukti memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan output nasional. Sebaliknya, apabila penerimaan pajak digunakan untuk belanja yang bersifat konsumtif, maka kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya stabilitas kebijakan perpajakan dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Widodo dan Guritno berpendapat bahwa sistem pajak penghasilan yang stabil dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong investasi. Dengan demikian, pajak penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Temuan Widodo dan Guritno memperkuat hasil penelitian Saragih (2018) yang menyatakan bahwa pajak penghasilan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, asalkan dirancang dengan tarif yang

Page 15 of 26

proporsional dan didukung oleh pengelolaan belanja negara yang efektif. Oleh karena itu, pajak penghasilan di Indonesia perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Yuliana dan Handayani (2019) dalam (Fitri et al., 2025) penelitiannya menganalisis keterkaitan antara penerimaan pajak, termasuk pajak penghasilan, belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data makroekonomi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan belanja pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa pajak penghasilan tidak secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi apabila tidak diikuti dengan belanja pemerintah yang produktif. Penerimaan PPh akan memberikan dampak yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi ketika dialokasikan pada sektor-sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Alokasi belanja yang tepat tersebut mampu meningkatkan produktivitas faktor produksi dan memperluas kapasitas ekonomi nasional. Yuliana dan Handayani juga menyoroti bahwa efektivitas pajak penghasilan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola fiskal. Pengelolaan pajak dan belanja negara yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik serta kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan, basis pajak menjadi lebih luas sehingga penerimaan pajak penghasilan dapat terus meningkat tanpa harus menaikkan tarif secara berlebihan.

Gregory Mankiw, Dvid Romer, 1992 dalam artikelnya yang berjudul “A Contribution to the Empirics of Economic Growth” mengembangkan model pertumbuhan neoklasik dengan memasukkan peran modal manusia sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam kerangka tersebut, kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal dan perpajakan, memiliki peran penting dalam memengaruhi akumulasi modal fisik dan modal manusia. Meskipun

Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia  
(Intan Marselina Da Lopez, Marjenya Putry Ndak, Mariana Chelsea Pamut, Maria Regina Cherlin Bui Kein, Bergita Mediatriks Rinanda, Theresia Avila Surat Angin, Maria O. Lewo Melan, Noberta Sabu Making, Vinsensia Chinthya Berek, Ayuvera Rifani Ray, 2026)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 4, No. 1, Maret 2026, (Hal. 1-26)

penelitian ini tidak secara eksplisit membahas pajak penghasilan, temuan Mankiw, Romer, dan Weil memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menjelaskan mekanisme tidak langsung pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak penghasilan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai investasi publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Investasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Mankiw, Romer, dan Weil menekankan bahwa perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antarnegara dapat dijelaskan oleh perbedaan tingkat tabungan, investasi modal manusia, dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, pajak penghasilan berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengurangi keterbatasan pembiayaan pembangunan, sehingga memungkinkan peningkatan investasi pada sektor-sektor produktif yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, kontribusi Mankiw, Romer, dan Weil memperkuat argumen bahwa pajak penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi publik dan akumulasi modal manusia. Kerangka teori ini menjadi dasar konseptual bagi penelitian empiris mengenai peran pajak penghasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Temuan Yuliana dan Handayani memperkuat hasil penelitian Widodo dan Guritno (2017) serta Saragih (2018) yang menyatakan bahwa pajak penghasilan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme belanja pemerintah. Dengan demikian, pajak penghasilan harus dipandang sebagai bagian dari sistem kebijakan fiskal yang

Page 17 of 26

**Intan Marselina Da Lopez, Marjenya Putry Ndak, Mariana Chelsea Pamut , Maria Regina Cherlin Bui Kein, Bergita Mediatriks Rinanda, Theresia Avila Surat Angin, Maria O. Lewo Melan, Noberta Sabu Making, Vinsensia Chinthya Barek, Ayuvera Rifani Ray**

Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

terintegrasi antara penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa Pajak Penghasilan (PPh) memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai sumber utama pendapatan negara dan instrumen kebijakan fiskal. Sejak reformasi perpajakan tahun 1984, PPh menjadi kontributor signifikan terhadap penerimaan pajak nasional, yang mencapai target besar dalam APBN 2024. Penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak, khususnya PPh, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun efektivitasnya sangat tergantung pada kebijakan tarif dan penggunaan alokasi belanja negara. Penelitian oleh Saragih, Widodo, dan Guritno menegaskan bahwa PPh dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika dialokasikan untuk sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, penting bagi kebijakan pajak penghasilan dirancang secara proporsional dan didukung oleh pengelolaan fiskal yang transparan dan efektif, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dapat optimal. Pajak penghasilan harus dilihat sebagai bagian integral dari sistem kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.

## **2. Hubungan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

Hasil kajian literatur ini menunjukkan bahwa pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pajak, sebagai sumber pendanaan utama, berkontribusi signifikan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk proyekproyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, sistem transportasi, dan penyediaan energi. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan pajak, khususnya dari pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), telah meningkat, memberikan peluang lebih besar bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur. Dalam konteks ini, alokasi

anggaran yang meningkat untuk pembangunan infrastruktur mencerminkan kesadaran pemerintah akan pentingnya infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi transportasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Sebagai contoh, proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol dan bandara baru menunjukkan dampak langsung terhadap peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Hubungan antara pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pajak penghasilan bersifat saling memperkuat. Infrastruktur meningkatkan pertumbuhan ekonomi; pertumbuhan ekonomi memperluas basis pajak; dan penerimaan pajak, terutama PPh, kembali digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Siklus positif ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan pembangunan fisik merupakan instrumen strategis bagi Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara peningkatan kepatuhan PPh, efisiensi belanja infrastruktur, serta pemerataan pembangunan menjadi kunci untuk memperkuat perekonomian nasional. Pembangunan infrastruktur di Indonesia menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini berarti ketika pembangunan infrastruktur dengan indikator jalan mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan teori Adam Smith, Harrod Domar, David Ricardo, dan Solow Swan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) bergantung pada akumulasi modal investasi infrastruktur yang menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

**Intan Marselina Da Lopez, Marjenya Putry Ndak, Mariana Chelsea Pamut , Maria Regina Cherlin Bui Kein, Bergita Mediatriks Rinanda, Theresia Avila Surat Angin, Maria O. Lewo Melan, Noberta Sabu Making, Vinsensia Chinthya Barek, Ayuvera Rifani Ray**

Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Maryaningsih, 2014 menyatakan bahwa variable pembangunan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dampak Pembangunan infrastruktur Indonesia digambarkan dalam berbagai indikator daya saing. Misalnya, pada tahun 2017 indeks peringkat Indonesia untuk kemudahan berusaha (Index of Ease of Doing Business) melejit dari posisi ke 106 menjadi 91, suatu lonjakan 15 anak tangga. Setelahnya, indeks daya saing di tahun 2017 posisi Indonesia naik dari peringkat 41 menjadi 36. Hasil yang konsisten diperoleh dari survey LPI tahun 2018, dimana kita berhasil meningkatkan daya saing sehingga menduduki peringkat 46 dari 160 negara yang disurvei. Sementara itu, dampak pada kesejahteraan pembangunan infrastruktur dilihat dari angka elastisitas tenaga kerja Indonesia yang telah meningkat dari 0,22% pada akhir dari periode bonanza komoditi (2010-2014) menjadi 0,53% pada periode 2015-2017. Pada tahun 2018, BPS juga mencatat bahwa angka kemiskinan Indonesia merupakan yang terendah sejak 1999 sebesar 9,82% dari jumlah penduduk total. Pada penelitian Mega Lestari (2019) pembangunan infrastruktur dengan indikator jalan mengalami kenaikan dan diikuti oleh peningkatan indikator pendapatan per kapita, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan indikator peningkatan produk domestik bruto (PDB), akan diikuti oleh peningkatan indikator pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan jika dibarengi dengan penurunan ketimpangan, artinya pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap pemerataan ekonomi, ketimpangan (pemerataan) memiliki hubungan yang cukup erat dengan pertumbuhan ekonomi. Data rasio gini Indonesia menunjukkan hasil penurunan yang signifikan. Hasil ini diperkuat juga oleh pernyataan dari Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal yang menyatakan bahwa, penurunan atau peningkatan rasio gini biasanya sejalan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), hal tersebut berarti peningkatan pada pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap pemerataan ekonomi.

Sibarani (2018) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menganalisis peran infrastruktur fisik, khususnya infrastruktur jalan, listrik, dan telekomunikasi, terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel antarprovinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut, Sibarani menjelaskan bahwa infrastruktur jalan berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya transportasi, serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, terutama pada sektor perdagangan dan industri. Infrastruktur listrik juga terbukti meningkatkan kapasitas produksi dengan menjamin ketersediaan energi yang stabil bagi kegiatan ekonomi, sedangkan infrastruktur telekomunikasi berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi informasi dan produktivitas tenaga kerja. Penelitian ini juga menekankan bahwa dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bersifat seragam antarwilayah. Daerah dengan tingkat infrastruktur awal yang rendah cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dari pembangunan infrastruktur dibandingkan daerah yang infrastrukturnya sudah relatif maju (Nurbariya Pane, Sri Devi Sembiring, 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian Sibarani memperkuat temuan Aschauer (1989) serta Calderón dan Servén (2010) yang menyatakan bahwa investasi infrastruktur publik merupakan faktor kunci dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan secara merata dan berkelanjutan agar mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Bangun & Firdaus, 2009 dalam penelitiannya menganalisis peran belanja pemerintah di sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggunakan pendekatan ekonometrika berbasis data time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa investasi pemerintah pada sektor infrastruktur mampu mendorong peningkatan output nasional. Lebih lanjut, Prasetyo dan Firdaus menjelaskan bahwa infrastruktur berfungsi sebagai faktor pendukung utama bagi kegiatan ekonomi melalui peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Infrastruktur transportasi, khususnya jalan dan pelabuhan, berperan dalam menurunkan biaya logistik dan mempercepat arus barang dan jasa antarwilayah. Selain itu, infrastruktur energi dan utilitas publik juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi sektor industri dan jasa. Penelitian ini juga menekankan bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun tanpa perencanaan yang matang berpotensi tidak memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Prasetyo dan Firdaus menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan pembangunan infrastruktur dan kebijakan ekonomi makro secara keseluruhan. Temuan Prasetyo dan Firdaus memperkuat hasil penelitian Aschauer (1989) serta Sibarani (2018) yang menyatakan bahwa investasi infrastruktur publik merupakan salah satu determinan utama pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat daya saing nasional dan mendorong pemerataan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di ketahui menunjukkan bahwa pajak, terutama pajak penghasilan, memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan pajak memberi peluang besar bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan sistem transportasi, yang meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan konektivitas mengurangi biaya transportasi dan memperlancar distribusi barang. Meskipun ada peningkatan indikator ekonomis, hasil kajian juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pemerataan untuk mengurangi ketimpangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan infrastruktur awal yang rendah memperoleh manfaat lebih besar dari pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara merata dan berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan mendukung pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan fiskal dan pembangunan infrastruktur harus saling terintegrasi untuk meningkatkan daya saing negara dan memperkuat perekonomian nasional.

Pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan tingkat produksi, di mana pembangunan ekonomi berkontribusi pada kenaikan Produk Domestik Bruto (GDP). GDP, yang mencerminkan total output barang dan jasa, mengalami pertumbuhan seiring dengan adanya pembangunan yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berbagai pilihan ekonomi. Dengan meningkatnya produksi, masyarakat

memiliki kemudahan dalam mendapatkan barang dan jasa, serta akses yang lebih baik terhadap sarana transportasi. Selain itu, pembangunan ekonomi juga mengakibatkan perubahan mendalam di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Perubahan sosial muncul dalam bentuk pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, seperti pemahaman yang lebih luas tentang ilmu pengetahuan. Secara ekonomi, masyarakat mengalami kenaikan pendapatan dan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Dalam ranah politik, pembangunan ini mengarah pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi dan keadilan dalam sistem politik. Lebih jauh, jika pembangunan ekonomi berjalan dengan baik, masyarakat suatu negara akan merasakan kesejahteraan yang lebih besar. Dengan kebutuhan yang terpenuhi, masyarakat cenderung lebih memperhatikan lingkungan sekitar dan bersikap peduli terhadap isu-isu keadilan, termasuk hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memupuk nilai-nilai kebersamaan dan kesadaran sosial yang lebih tinggi di antara warga negara.

## **Simpulan**

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan (PPh) dan pembangunan infrastruktur memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendanaan untuk pembangunan infrastruktur yang krusial, seperti jalan, jembatan, dan layanan publik lainnya, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi, konektivitas, dan daya saing ekonomi. Peningkatan pendapatan pajak tidak hanya mendukung pembangunan fisik, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui alokasi yang tepat, pajak dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong sektor-sektor produktif serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal yang efektif dan investasi infrastruktur

Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia  
(Intan Marselina Da Lopez, Marjenya Putry Ndak, Mariana Chelsea Pamut, Maria Regina Cherlin Bui Kein, Bergita Mediatriks Rinanda, Theresia Avila Surat Angin, Maria O. Lewo Melan, Noberta Sabu Making, Vinsensia Chinthya Berek, Ayuvera Rifani Ray, 2026)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 4, No. 1, Maret 2026, (Hal. 1-26)

yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas, serta memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Keberhasilan dalam pembangunan dan pengelolaan perpajakan akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

## Daftar Pustaka

- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., Jannah, L. L., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, B. (2025). *Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam sistem perekonomian indonesia*. 3(11).
- Alvena Adhina Putri, Achmad Aryazeta, Zainal Fu'ad, D. (2024). *Teori-Teoripertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi*. 1192, 182–192.
- Arga, K., Safe, M., & Yossi, M. (2022). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 3(I), 62–79.
- Bangun, R., & Firdaus, M. (2009). *Pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di indonesia*. 222–236.
- Christina, M. (2024). *Hubungan Perpajakan Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Pajak Startup Informasi Pajak Untuk Perusahaan Startu. <https://pajakstartup.com/2024/01/26/hubungan-perpajakan-dengan-pertumbuhan-ekonomi/>
- Dampak Kebijakan Fiskal dan Ekonomi*. (2023). FinFloo. <https://finfloo.com/dampak-kebijakan-fiskal-dan-ekonomi/>
- Fitri, S. L., Andiny, P., Rizal, Y., Pembangunan, E., Samudra, U., Jl, A., Thayeb, P. S., Lama, L., & City, L. (2025). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Laju Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh*.
- Gregory Mankiw, Dvid Romer, D. W. (1992). *A Contribution To The Empirics OF. May*.
- Jeni Palindangan, A. B. (2021). *Analisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi dan*

**Intan Marselina Da Lopez, Marjenya Putry Ndak, Mariana Chelsea Pamut , Maria Regina Cherlin Bui Kein, Bergita Mediatriks Rinanda, Theresia Avila Surat Angin, Maria O. Lewo Melan, Noberta Sabu Making, Vinsensia Chinthya Barek, Ayuvera Rifani Ray**

Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

*indeks pembangunan manusia (ipm) terhadap tingkat pengangguran di kabupaten mimika. 5(April), 65–80.*

Joana, P. (2022). *Dasar Teori Pemungutan Pajak*. PajakMania. <https://pajakmania.com/dasar-teori-pemungutan-pajak/>

Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*.

Nurbariya Pane, Sri Devi Sembiring, I. U. (2020). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Pendidikan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. *Jurnal Sekolah*, 4(2), 172–182.

Rahma, A. (2022). *4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli*. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6073440/4-teori-pertumbuhan-ekonomi-menurut-para-ahli/amp>

Saragih, A. H. (2018). *Sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan*. 3(1), 17–27.

*Sistem Pajak di Indonesia: Struktur, Jenis Pajak, dan Peranannya dalam Perekonomian*. (2025). TAXSAM.CO Logo.